

ABSTRACT

The DPR has three main functions, namely the legislative function, the budget function and the supervisory function. In essence, the three functions of the DPR have a close relationship and these three functions are always in contact with other functions, for example, the three DPRs produce laws which are then approved together with the President, so the DPR must provide supervision over the implementation of legal products by the executive agency, namely President. In carrying out its duties and functions, related to the implementation of its supervisory function, the DPR has three rights, one of which is the Right of Interpellation, namely the DPR's right to ask the Government for information regarding government policies that are important and strategic and have a broad impact on the life of the community, nation and state.

This research uses a normative legal method with a statutory approach, namely a research approach carried out by examining all laws and regulations related to the legal issue being researched. and case approach. This approach is carried out by reviewing cases related to the issue at hand which have become court decisions that have permanent legal force.

In the context of allegations of fraud in the 2024 general election, the use of the right of interpellation has high urgency because it concerns the credibility and integrity of the democratic process in Indonesia. If there are indications of fraud, interpellation can be used to request clarification from the government regarding the steps taken to maintain election fairness and transparency. Apart from that, this interpellation also functions to ensure that the election is carried out in accordance with democratic principles, maintains political stability, and prevents the potential for greater conflict due to public dissatisfaction. Thus, the right of interpellation acts as a tool of supervision and accountability, maintaining public trust in state institutions in the general election process. The use of the DPR RI's right of interpellation in allegations of fraud in the 2024 general election is an important step in carrying out the function of legislative oversight of the executive. Through interpellation, the DPR RI can request a direct explanation from the government regarding the alleged fraud that occurred, as well as what actions have been and will be taken to deal with the issue.

Keywords: function of the DPR, use of the right of interpellation, general election

ABSTRAK

DPR memiliki tiga fungsi utama tersebut adalah fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pada hakikatnya ketiga fungsi DPR tersebut memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketiga DPR menghasilkan Undang-undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-undang oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR mendapatkan tiga hak, salah satunya Hak Interpelasi, yakni hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. dan pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam konteks dugaan kecurangan pemilihan umum 2024, penggunaan hak interpelasi memiliki urgensi tinggi karena menyangkut kredibilitas dan integritas proses demokrasi di Indonesia. Jika ada indikasi kecurangan, interpelasi dapat digunakan untuk meminta klarifikasi dari pemerintah terkait langkah-langkah yang diambil dalam menjaga keadilan dan transparansi pemilu. Selain itu, interpelasi ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, menjaga stabilitas politik, dan mencegah potensi konflik yang lebih besar akibat ketidakpuasan masyarakat. Dengan demikian, hak interpelasi berperan sebagai alat pengawasan dan akuntabilitas, menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara dalam proses pemilihan umum. Penggunaan hak interpelasi DPR RI dalam dugaan kecurangan pemilihan umum 2024 merupakan langkah penting dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Melalui interpelasi, DPR RI dapat meminta penjelasan langsung dari pemerintah mengenai dugaan kecurangan yang terjadi, serta tindakan apa yang telah dan akan diambil untuk menangani isu tersebut.

Kata kunci : fungsi DPR, penggunaan hak interpelasi, pemilihan umum